

RENCANA AKSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2026

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat						
1	Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Harmoni				
1.1	Meningkatnya hubungan yang harmoni antar berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat	Indeks kesadaran berbangsa				
1.1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
1.1.1.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
1.1.1.1.1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				
	a. Pelaksanaan rapat persiapan upacara	Jumlah pelaksanaan rapat persiapan upacara	1	3	1	6
	b. Pelaksanaan kegiatan persiapan upacara	Jumlah pelaksanaan kegiatan persiapan upacara	1	2	1	3
	c. Pelaksanaan kegiatan upacara	Jumlah kegiatan upacara yang dilaksanakan	1	3	1	6
	d. Penyusunan laporan kegiatan	Jumlah laporan kegiatan yang disusun	1	3	1	6

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.1.1.2	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				
	a. Penyusunan SK Tim PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) dan Bela Negara	Jumlah dokumen SK Tim PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) dan Bela Negara	1	0	0	0
	b. Pelaksanaan rapat persiapan seleksi paskibraka	Jumlah pelaksanaan rapat persiapan seleksi paskibraka	1	0	0	0
	c. Pelaksanaan kegiatan seleksi paskibraka	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi paskibraka	1	3	0	0
	d. Pelaksanaan kegiatan pembekalan paskibraka	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembekalan paskibraka	0	1	0	0
	e. Pelaksanaan kegiatan pelatihan paskibraka	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan paskibraka	0	0	14	0
	f. Pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan pelaksanaan paskibraka	Jumlah kegiatan pengukuhan dan pelaksanaan paskibraka	0	0	1	0
	g. Pelaksanaan kegiatan pembubaran paskibraka	Jumlah kegiatan pembubaran paskibraka	0	0	1	0
	h. Pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan	0	2	0	0
	i. Pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2026	Laporan akhir pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2026	0	0	0	1
	j. Pelaksanaa pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa Tahun 2025	Laporan akhir pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa Tahun 2025	1	0	0	0
	k. Penyusunan laporan	Jumlah laporan yang disusun	0	0	1	0
1.1.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.2.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Jumlah Konstituen yang mendapatkan Pendidikan Politik di Kabupaten Gresik				
1.1.2.1.1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	a. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dan budaya politik	Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan budaya politik	0	1	1	0
	b. Pelaksanaan rapat koordinasi / konsolidasi / forum diskusi pendidikan politik dan budaya politik	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi / konsolidasi / forum diskusi	1	0	0	1
	c. Pelaksanaan rapat koordinasi / konsolidasi / forum diskusi (DPRD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi / konsolidasi / forum diskusi (DPRD)	1	0	0	2
	d. Pelaksanaan rapat tim terpadu pendidikan politik dan pembinaan demokrasi	Jumlah pelaksanaan rapat tim terpadu pendidikan politik dan pembinaan demokrasi	3	3	3	3
1.1.2.1.2	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	a. Pelaksanaan rapat tim verifikasi bantuan keuangan partai politik	Jumlah pelaksanaan rapat tim verifikasi bantuan keuangan partai politik	0	2	0	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	b. Pelaksanaan rapat bantuan keuangan partai politik	Jumlah pelaksanaan rapat bantuan keuangan partai politik	0	1	1	1
1.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas				
1.1.3.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik				
1.1.3.1.1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	a. Pelaksanaan layanan pelaporan keberadaan / pendaftaran organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan layanan pelaporan keberadaan / pendaftaran organisasi kemasyarakatan	3	3	3	3
	b. Rapat satgas premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah	Jumlah pelaksanaan rapat satgas premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah	0	1	3	0
	c. Pelaksanaan rapat tim terpadu pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan rapat tim terpadu pemberdayaan organisasi kemsayarakatan	3	3	3	3
1.1.3.1.2	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi / pembinaan / pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi / pembinaan / pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	1	0	1	0
	b. Pelaksanaan rapat koordinasi / audiensi pembinaan / pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi / audiensi pembinaan / pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	3	3	3	1
	c. Pelaksanaan rapat koordinasi / audiensi (DPRD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi / audiensi DPRD	0	3	2	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.4	PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional				
1.1.4.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Gresik				
1.1.4.1.1	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah				
	a. Penyusunan SK tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah dokumen SK tim kewaspadaan dini pemerintahan daerah dan tim terpadu penanganan konflik sosial	1	0	0	0
	b. Pelaksanaan fasilitasi konflik / pemantauan unjuk rasa	Jumlah kegiatan pelaksanaan fasilitasi konflik / pemantauan unjuk rasa	3	3	3	2
	c. Pelaksanaan rapat penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan rapat penanganan konflik sosial dan keawaspadaan dini pemerintah daerah	5	6	6	5
	d. Pelaksanaan rapat tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	3	3	3	3
	e. Pelaksanaan pembuatan laporan	Jumlah laporan yang disusun	0	0	0	1
1.1.4.1.2	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Pelaksanaan penyusunan SK Tim Forkopimda dan pembuatan laporan	Jumlah dokumen penyusunan SK Tim Forkopimda dan pembuatan laporan	1	0	0	0
	b. Pelaksanaan rapat Forkopimda	Jumlah rapat Forkopimda yang dilaksanakan	3	3	3	3

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD				
1.1.5.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.5.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	a. Penyusunan dokumen DPA Tahun Anggaran 2026	Jumlah dokumen DPA Tahun Anggaran 2026 yang disusun	1	0	0	0
	b. Penyusunan Pra RKA Tahun Anggaran 2026	Jumlah dokumen pra RKA Tahun Anggaran 2026	1	0	0	0
	c. Penyusunan dokumen RKA Tahun Anggaran 2026	Jumlah dokumen RKA Tahun Anggaran 2026 yang disusun	1	0	0	0
	d. Penyusunan dokumen RAK Tahun Anggaran 2026	Jumlah dokumen RAK Tahun Anggaran 2026 yang disusun	1	0	0	0
	e. Penyusunan rancangan awal Renja Tahun 2027	Jumlah dokumen rancangan awal Renja Tahun 2027 yang disusun	1	0	0	0
	f. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2027	Jumlah dokumen Renja Tahun 2027 yang disusun	0	0	0	1
	g. Pelaksanaan kegiatan forum OPD	Jumlah kegiatan forum OPD yang dilaksanakan	1	0	0	0
	h. Penyusunan Pra RKA Tahun Anggaran 2027	Jumlah dokumen pra RKA Tahun Anggaran 2027 yang disusun	1	0	0	0
	i. Penyusunan dokumen DPPA Tahun Anggaran 2026	Jumlah dokumen DPPA Tahun Anggaran 2026 yang disusun	0	0	0	1
	j. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Renja Tahun 2027	Jumlah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Renja Tahun 2027 yang disusun	35	0	0	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.5.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	a. Penyusunan pemenuhan data dukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Tahun 2026	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Tahun 2026	1	0	0	0
	b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2025	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2025	1	0	0	0
	c. Penyusunan rencana target penyerapan anggaran kegiatan tahun anggaran 2026 (R2 dan R3)	Jumlah dokumen rencana target penyerapan anggaran kegiatan tahun anggaran 2026 (R2 dan R3)	1	0	0	0
	d. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi renja terhadap renstra	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi renja terhadap renstra yang disusun	1	1	1	1
	e. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025	Laporan Akhir Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025	1	0	0	0
	f. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	0	2	1	1
1.1.5.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.1.5.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
	a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional) penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional) penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	3	3	3	3
1.1.5.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.1.5.3.1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Penyusunan laporan belanja peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang disusun	6	6	6	6
1.1.5.3.2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
	a. Penyusunan laporan belanja bahan logistik kantor	Jumlah laporan belanja bahan logistik kantor yang disusun	6	6	6	6
1.1.5.3.3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
	a. Penyusunan laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disusun	3	3	3	3
1.1.5.3.4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
	a. Penyusunan laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	3	3	3
1.1.5.3.5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	a. Penyusunan laporan perjalanan dinas biasa	Jumlah laporan perjalanan dinas biasa yang disusun	15	15	15	15
	b. Penyusunan laporan perjalanan dinas dalam kota	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam kota yang disusun	15	15	15	15
1.1.5.3.6	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
	a. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan personal komputer dan laptop/notebook	Jumlah dokumen administrasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan personal komputer dan laptop	1	0	0	0
	b. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan printer	Jumlah dokumen administrasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan printer	1	0	0	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	c. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan alat studio podcast	Jumlah dokumen administrasi persiapan dan pelaksanaan alat studio podcast	1	0	0	0
	d. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko SPBE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026	Jumlah dokumen Laporan Manajemen Risiko SPBE 2026	1	0	0	0
1.1.5.4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.1.5.4.1	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
	a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional) penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional) penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3	3	3	3
	b. Pelaksanaan belanja jasa tenaga pramubakti outsourcing	Jumlah laporan belanja jasa tenaga pramubakti outsourcing yang disusun	3	3	3	0
1.1.5.5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.1.5.5.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	a. Penyusunan laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disusun	6	6	6	6
1.1.5.5.2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Penyusunan laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah laporan belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	6	6	6
1.1.5.5.3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
	a. Penyusunan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laporan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2	2	2	2
1.1.5.5.4	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	a. Perencanaan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dokumen administrasi persiapan pengadaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	0	0	0
	b. Pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	1	0	0
	c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dokumen pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	1	0	0
1.2	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN)	Indeks kemandirian partisipatif				
1.2.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.2.1.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				
1.2.1.1.1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	a. Pelaksanaan kegiatan dialog pemuda lintas agama	Jumlah kegiatan pelaksanaan dialog pemuda lintas agama	0	1	1	0
	b. Pelaksanaan rapat fasilitasi hibah FKUB dan BNNK	Jumlah pelaksanaan rapat fasilitasi hibah FKUB dan BNNK	4	0	0	0

Gresik, Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197001051990031008